KOTA MADIUN

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN

2026

RENJA

(RENCANA KERJA)

(0351)471151/496541

http://www.madiunkota.go.id

Gedung Graha Krida Praja Lt 1
Jl D.I panjaitan No.17 Kota Madiun

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

NOMOR : 050 / 1986/ 401.110 / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor2l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kota/Kabupaten;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Taa Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/335/2021 tentang Rincian Subkoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

21. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Sub Koordinator agar menjadikan Perubahan Renja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal, 9 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

HARTO MEGAH, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197710122006041009

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 54
3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 75
BAB V PENUTUP 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Kota Madiun.....	6
Tabel 2	Jenis Pelayanan dan Program Pengampu	22
Tabel 3	Pencapaian Kinerja	25
Tabel 4	Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja	28
Tabel 5	Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	33
Tabel 6	Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan	34
Tabel 7	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Madiun	36
Tabel 8	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Madiun	50
Tabel 9	Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026	52
Tabel 10	Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2026	53
Tabel 11	Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Target	55
Tabel 12	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 Serta Prakiraan Maju Tahun 2026	61
Tabel 13	Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2026	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renja PD tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yang dimulai dari tahapan :

a. persiapan penyusunan.
b. penyusunan rancangan awal.
    - penyusunan dilakukan paling lambat minggu pertama bulan desember (n-2) dengan berpedoman pada Renstra PD dan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu.
    - penyempurnaan rancangan awal berpedoman pada Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah.
c. penyusunan rancangan.
d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
    - dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
e. perumusan rancangan akhir. dan
f. penetapan
    - ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan merupakan potret dari Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang telah disampaikan melalui berbagai tahapan dan telah dirumuskan untuk mendukung kebijakan kepala daerah, menampung usulan masyarakat dan stakeholder, selain itu Renja Perangkat Daerah yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan tupoksi Perangkat Daerah dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …… Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
p. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020
q. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
r. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
s. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025
t. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026
u. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026
v. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
w. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor ….. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2026
x. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor ….. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024;
2. Memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

1. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan.

2. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut :

Penetapan Renja Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Kota Madiun

Kode					Ursan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode (2025)	Realisasi Target Kinerja (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Renja (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)		
									Target Renja Perangkat daerah (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	**3**				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	3.94 Indeks					3.94 Indeks			Rp 16.060.819.641,10
1	**3**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah**	100%					100%			Rp 294.251.670

1	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen					8 dokumen			Rp 140.868.950
1	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan					12 laporan			Rp 153.382.720
1	**3**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan**	100%					100%			Rp 4.646.599.190
1	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Orang/bulan					48 Orang/ bulan			Rp 4.646.599.190
1	**3**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum**	100%					100%			Rp 467.467.000
1	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan					12 laporan			Rp 467.467.000
1	**3**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah**	100%					100%			Rp 1.198.340.368

					Pemerintah Daerah										
1	3	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit					2 unit			Rp 1.198.340.368
1	**3**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	100%					100%			Rp 7.289.459.777,10
1	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan					12 laporan			Rp 7.289.459.777,10
1	**3**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan**	100%					100%			Rp 2.164.701.636
1	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	54 unit					54 unit			Rp 1.009.193.670

1	3	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit					1 unit			Rp 923.319.000
1	3	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit					5 unit			Rp 232.188.966
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/Genangan**	16,97%					16,97%			Rp 7.418.590.000
1	**3**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/Genangan**	16,97%					16,97%			Rp 7.418.590.000
1	3	2	02.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	0 unit					0 unit			Rp 438.110.000
1	3	2	02.01	85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit					1 unit			Rp 886.260.000

1	3	2	02.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1 km					1 Km			Rp 6.094.220.000
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	100%					100%			Rp 645.649.300
1	**3**	**3**	**02.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	100%					100%			Rp 645.649.300
1	3	3	02.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR					100 SR			Rp 645.649.300
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT**	100%					100%			Rp 1.670.125.500

1	**3**	**5**	**02.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT**	100%					100%			Rp 1.670.125.500
1	3	3	02.01	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit					1 Unit			Rp 1.342.300.000
1	3	3	02.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit					5 Unit			Rp 327.825.500
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik**	81,67%					81,67%			Rp 18.456.590.200
1	**3**	**6**	**02.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik**	81,67%					81,67%			Rp 18.456.590.200

1	3	6	02.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 m					2000 m			Rp 7.632.870.000
1	3	6	02.01	24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan					1 Sistem Drainase Perkotaan			Rp 7.080.920.000
1	3	6	02.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	12 dokumen					12 dokumen			Rp 949.910.000
1	3	6	02.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan					1 Sistem Drainase Perkotaan			Rp 2.792.890.200
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan**	100%					100%			Rp 24.300.070.164
1	**3**	**8**	**02.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan**	**Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan**	100%					100%			Rp 24.300.070.164

					Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										
1	3	8	02.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	8 bangunan gedung					8 bangunan gedung			Rp 500.000.000
1	3	8	02.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen					2 dokumen			Rp 23.550.070.164

1	3	8	02.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 dokumen					10 dokumen			Rp 250.000.000
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/Genangan**	16,97%					16,97%			Rp 1.014.206.000
1	**3**	**9**	**02.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/Genangan**	16,97%					16,97%			Rp 1.014.206.000

1	3	9	02.01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 kawasan					1 kawasan			Rp 1.014.206.000
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab**	95,80%					95,80%			Rp 34.486.731.600
1	**3**	**10**	**02.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab**	95,80%					95,80%			Rp 34.486.731.600
1	3	10	02.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 dokumen					5 dokumen			Rp 221.998.400
1	3	10	02.01	31	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan					2 Jembatan			Rp 23.710.000

1	3	10	02.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 Km					1 Km			Rp 2.216.740.000
1	3	10	02.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8 Km					8 Km			Rp 21.952.430.000
1	3	10	02.01	37	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 Km					1 Km			Rp 929.010.000
1	3	10	02.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dipelihara Secara Rutin	25 Jembatan					25 Jembatan			Rp 221.430.000
1	3	10	02.01	41	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 Km					1 Km			Rp 2.626.190.000
1	3	10	02.01	42	Pemeliharan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan					2 Jembatan			Rp 243.960.000
1	3	10	02.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 km					3 km			Rp 408.810.000
1	3	10	02.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Rutin	20 Km					20 Km			Rp 5.642.453.200
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan**	100%					100%			Rp 1.360.348.300

1	**3**	**11**	**02.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan**	100%					100%			Rp 264.295.000
1	3	11	02.01	16	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 orang					60 orang			Rp 264.295.000
1	**3**	**11**	**02.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan**	100%					100%			Rp 103.926.500
1	3	11	02.02	13	Penyediaan data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	2 Dokumen					2 Dokumen			Rp 103.926.500
1	**3**	**11**	**02.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan**	100%					100%			Rp 992.126.800

1	3	11	02.04	4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan					100 Paket Pekerjaan			Rp 992.126.800
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW**	100%					100%			Rp 1.400.000.000
1	**3**	**12**	**02.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW**	100%					100%			Rp 650.000.000
1	3	12	02.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen					1 dokumen			Rp 650.000.000
1	**3**	**12**	**02.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW**	100%					100%			Rp 400.000.000

1	3	12	02.03	3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	20 dokumen					20 dokumen			Rp 400.000.000
1	**3**	**12**	**02.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW**	100%					100%			Rp 350.000.000
1	3	12	02.04	8	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	300 dokumen					300 dokumen			Rp 350.000.000

KETERANGAN :

	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

Berdasarkan tabel capaian kinerja renstra diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :

1. Tidak terdapat Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, semua target tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Berdasarkan Tabel 1 Realisasi semua program, kegiatan, dan sub kegiatan tercapai sesuai target kinerja yang direncanakan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian renstra perangkat daerah:
    a. Program yang melebihi target
        i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
            a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
            b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
            c) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
            d) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
            e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya;
            f) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
        ii. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai.
        iii. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana/Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
        iv. Program Penataan Bangunan Gedung, Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan,

Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

v. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Daerah Kabupaten / Kota.

vi. Program Penyelenggaraan Jalan

vii. Program Pengelolaan dan Pengembangan System Penyedian Air Minum, Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :

   a. Tidak tercapainya/tidak memenuhi target kinerja

      Semua target kinerja dapat tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan adanya perencanaan kegiatan dan penganggaran yang tepat. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap permasalahan yang ada dapat diatasi guna terlaksananya kegiatan sesuai target yang direncanakan.

   b. Realisasi kinerja yang memenuhi atau melebihi target kinerja

      Semua sasaran kinerja menghasilkan capaian kinerja yang melebihi dari target kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Tabel 2 Jenis Pelayanan dan Program Pengampu
Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Program	Keterangan
1	Pelayanan ijin penurunan trotoar	Penyelenggaraan jalan	
2	Pelayanan ijin penempatan bangunan reklame	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
3	Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Hotline TK Layanan PKKPR dan SIM BG DPUPR
4	Pelayanan kesesuaian pemanfaatan ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Hotline TK Layanan PKKPR dan SIM BG DPUPR
5	Pelayanan setifikat layak fungsi	Penaatan Bangunan Gedung	
6	Pelayanan pengaduan saluran drainase	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 2. Pengelolaan Smber Daya Air	

Indikator yang menjadi tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah meliputi :

1. Indikator Tujuan Perangkat Daerah "Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas"
    a. Indikator tujuan perangkat daerah adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI);
    b. Kinerja kualitas infrastruktur kota adalah kualitas jalan yang mantab, bangunan gedung pemerintah yang representatif, saluran lingkungan dan saluran drainase berfungsi dengan baik;
    c. Rumus Perhitungan kinerja ini dibentuk dari rata-rata beberapa indicator antara lain; indakator Persentase aksesbilitas kota dalam kondisi mantab, Presentase

kawasan rawan banjir/genangan, Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik, Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan.

2. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya Kualitas Layanan Publik"
   a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu instrument/ tolak ukur yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas serta kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada pemerindah daerah;
   b. Rumus Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat dengan menyebar kuisioner yang berisi pertanyaan terkait berbagai aspek pelayanan, dengan cara mengumpulkan data responden, kemudian hitung rata-rata nilai setiap unsur pelayanan dengan menjumlahkan skor dan dibagi jumlah responden kemudian dikalikan dengan bobotnya untuk mendapatkan nilai tertimbang. Jumlahkan semua nilai rata-rata tertimbang untuk setiap unsur layanan untuk mendapatkan nilai IPP akhir, yang kemudian dianalisis berdasarkan tabel konversi mutu pelayanan.
3. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantap"
   a. Kinerja aksesbilitas kota adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan dari kondisi rusak ringan/ tanah menjadi kondisi mantab;
   b. Rumus Perhitungan diperoleh dari rasio perbandingan panjang jalan kota kondisi matab dengan total panjang jalan kota.
4. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan"
   a. Kinerja ini meliputi rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum, kawasan rawan banjir/genangan.
   b. Rumus Perhitungan kinerja tersebut ; rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum adalah rasio Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan Jumlah rumah tangga di Kota Madiun, kawasan rawan banjir/genangan rasio perbandingan antara Luas kawasan rawan banjir/genangan dengan luas kota Madiun, panjang saluran drainase dalam kondisi baik adalah rasio Panjang saluran drainase yang dibangun dengan total panjang saluran drainase di Kota Madiun, rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja adalah rasio Jumlah realisasi lokasi uji coba pengelolaan layanan lumpur tinja dengan Jumlah target lokasi uji coba pengelolaan layanan lumpur tinja.
5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya kualitas pembangunan gedung pemerintah"
   a. Mewujudkan kualitas bangunan/ gedung pemerintah menjadi lebih representative dan menambah masa manfaat bangunan.
   b. Rumus Perhitungannya rasio perbandingan dari jumlah bangunan gedung dalam kondisi baik dengan jumlah bangunan gedung.

6. Indikator Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan"
    a. Kinerja ini merupakan pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai ketentuan dan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tata ruang.
    b. Rumus Perhitungannya adalah rasio luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dibagi total luas wilayah.
7. Indikator Program Perangkat Daerah "Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah"
    a. Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara.
    b. Rumus Perhitungan Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Sakip.
8. Indikator SPM/LPPD yang di ampu "Kinerja Penyediaan kebutuhan pokok air minum"
    a. Sebagai pengampu SPM "Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari" Dinas Pekerjaan Umum setiap triwulan menerima laporan realisasi dari instansi pelaksana yaitu, PDAM.
    b. Rumus perhitungan dari rasio rumah tangga yang terlayani dengan Total rumah tangga di Kota Madiun.
9. Indikator SPM/LPPD yang di ampu "Kinerja Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik"
    a. Sebagai pengampu SPM "Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik". Dinas Pekerjaan Umum setiap triwulan menerima laporan realisasi dari instansi pelaksana yaitu, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
    b. Rumus perhitungan dari rasio Persentase Rumah tangga bersanitasi dengan Total rumah tangga di Kota Madiun.

Tabel 3 Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		√				91.86%	91.94%	92.49%	92.64%	91.87%	92.34%	100%	100%	Tercapai
2	Presentase kawasan rawan banjir/genangan			√			18.47%	17.34%	16.97%	16.74%	17.91%	17.17%	100%	100%	Tercapai
	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			√			15%	100%	30%	30%	15%	100%	100%	100%	Tercapai
	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik			√			80.09%	80.12%	81.67%	82.01%	80.10%	81.03%	100%	100%	Tercapai
3	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase aksesbilitas kota dalam kondisi mantab			√			95.50%	95.70%	95.80%	95.90%	95.52%	96.01%	100%	100%	Tercapai
6	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				√		82	85	85	85.50	86	85.63	100%	100%	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Perlindungan kawasan Permukiman rawan Banjir				√		-	0.699%	0.91%	1.13%	-	0.699%	100%	100%	Tercapai
	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum dalam jaringan perpipaan				√		100%	100%	100%	72%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja				√		0%	0%	10%	20%	0%	0%	100%	100%	Tercapai
	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik				√		80.09	80.12	81.67	82.01	80.10	81.03	100%	100%	Tercapai
8	Persentase Bangunan gedung dalam kondisi baik				√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
9	Persentase Penataan				√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bangunan dan Lingkungan														
10	Tingkat kemantaban jalan				√		95.50	95.70	95.80	95.90	95.52	96.01	100%	100%	Tercapai
11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil				√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
12	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah				√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	√				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
14	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	√				√	99.72%	99.81%	99.74%	99.77%	99.87%	99.81%	100%	100%	Tercapai

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 4 Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		√				Belum tersedianya data yang lengkap untuk mencukupi pemenuhan data inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah **Rencana Tindak Lanjut :** Koordinasi dengan bidang-bidang terkait data yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah	Adanya data perencanaan yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah
2	Presentase kawasan rawan banjir/genangan			√			Anggaran yang tersedia tidak mendukung pekerjaan dilaksanakan sehingga dilakukan pengurangan pekerjaan **Rencana Tindak Lanjut :** Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia	Adanya dokumen perencanaan yg menunjukkan kelayakan pembangunan drainase dan didukung anggaran sesuai kebutuhan
	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum			√			Jaringan penyediaan air minum yang belum tercukupi secara merata **Rencana Tindak Lanjut :** Meningkatkan penyediaan jaringan perpipaan untuk sambungan rumah sebagai pemenuhan kebutuhan air minum yang layak	Adanya upaya pemerataan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat perkotaan
	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			√			IPLT kota Madiun belum melaksanakan operasional pengelolaan lumpur tinja masyarakat **Rencana Tindak Lanjut :** Adanya upaya untuk melaksanakan operasional IPLT dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan sanitasi yang aman	Adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Madiun menjadi Kota yang sehat dan memiliki sanitasi yang aman
	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik			√			Adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa melaksanakan semua usulan masyarakat secara bersamaan **Rencana Tindak Lanjut :**	Adanya dokumen perencanaan yg menunjukkan kelayakan pembangunan saluran lingkungan, adanya usulan masyarakat dan didukung ketersediaan anggaran

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
							Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran	
3	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan			√			Banyaknya usulan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dari usulan masyarakat yang harus diakomodir sedangkan untuk anggarannya dibatasi **Rencana Tindak Lanjut :** Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung yang dilaksanakan adalah prioritas bangunan gedung yang potensi kerusakan berat	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
4	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan			√			Terjadi penyimpangan dikalangan masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang **Rencana Tindak Lanjut :** Memberikan sosialisasi aturan kepada masyarakat	Implentasi pemanfaatan tata ruang di masyarakat tidak terjadi penyimpangan karena sudah adanya kesadaran terhadap tertib aturan
5	Persentase aksesbilitas kota dalam kondisi mantab			√			Banyaknya usulan pembangunan dan pemeliharaan jalan dari masyarakat yang kurang tepat sasaran **Rencana Tindak Lanjut :** Melakukan survey kondisi jalan dan jembatan untuk mengetahui kondisi actual di lapangan	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
6	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				√		Tidak tersediannya data-data pendukung **Rencana Tindak Lanjut :** Koodinasi secara berkala dalam mendapatkan data yang akurat	Tersediannya data-data pendukung dalam penyusunan laporan
7	Persentase Peningkatan Perlindungan kawasan Permukiman rawan Banjir				√		Anggaran yang tersedia tidak mendukung pekerjaan dilaksanakan sehingga dilakukan pengurangan pekerjaan **Rencana Tindak Lanjut :** Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia	Adanya dokumen perencanaan yg menunjukkan kelayakan pembangunan drainase dan didukung anggaran sesuai kebutuhan
	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum dalam jaringan perpipaan				√		Jaringan penyediaan air minum yang belum tercukupi secara merata **Rencana Tindak Lanjut :**	Terpenuhinya kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat perkotaan

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
							Meningkatkan penyediaan jaringan perpipaan untuk sambungan rumah sebagai pemenuhan kebutuhan air minum yang layak	
	Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja				√		Masih adanya bagian bangunan/ kolam IPLT yang belum bisa difungsikan **Rencana Tindak Lanjut :** Segera dilakukan tes kolam dan pemenuhan sarana prasarana persiapan opersional IPLT	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana operasional IPLT
	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik				√		Adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa melaksanakan semua usulan masyarakat secara bersamaan **Rencana Tindak Lanjut :** Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran	Adanya dokumen perencanaan yg menunjukkan kelayakan pembangunan saluran lingkungan, adanya usulan masyarakat dan didukung ketersediaan anggaran
8	Persentase Bangunan gedung dalam kondisi baik				√		Banyaknya usulan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dari usulan masyarakat yang harus diakomodir sedangkan untuk anggarannya dibatasi **Rencana Tindak Lanjut :** Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung yang dilaksanakan adalah prioritas bangunan gedung yang potensi kerusakan berat	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
9	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan				√		Banyaknya usulan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dari usulan masyarakat yang harus diakomodir sedangkan untuk anggarannya dibatasi **Rencana Tindak Lanjut :** Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung yang dilaksanakan adalah prioritas bangunan gedung yang potensi kerusakan berat	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
10	Tingkat kemantaban jalan				√		Banyaknya usulan pembangunan dan pemeliharaan jalan dari masyarakat yang kurang tepat sasaran **Rencana Tindak Lanjut :**	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
							Melakukan survey kondisi jalan dan jembatan untuk mengetahui kondisi actual di lapangan	
11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil				√		Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai dengan jenjang pelatihan yang tinggi dan yang diminati (misal jenjang 5 ijazah terakhir minimal D3 sedangkan peminatnya ijazah terakhir SMA) **Rencana Tindak Lanjut :** Tenaga kerja konstruksi bias mengikuti pelatihan yang setara dengan kulaifikasi pendidikannya	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi
12	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah				√		Warga menganggap proses pengajuan perijinan PBG adalah proses yang sulit **Rencana Tindak Lanjut :** Perijinan dilakukan dengan cara online dan konvensional untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses proses perijinan	Teknologi dan aturan yang diberlakukan menjadikan akses pelayanan akan menjadi mudah dan cepat
13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	√				√	Jaringan penyediaan air minum yang belum tercukupi secara merata **Rencana Tindak Lanjut :** Meningkatkan penyediaan jaringan perpipaan untuk sambungan rumah sebagai pemenuhan kebutuhan air minum yang layak	Terpenuhinya kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat perkotaan
14	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	√				√	Masih adanya bagian bangunan/ kolam IPLT yang belum bisa difungsikan **Rencana Tindak Lanjut :** Segera dilakukan tes kolam dan pemenuhan sarana prasarana persiapan opersional IPLT	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana operasional IPLT

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2024 mendapatkan nilai indeks 86.88 dengan kategori Baik dengan mutu pelayanan B atau baik. Terdapat 2 unsur yang memiliki predikat Sangat baik terletak pada unsur tarif/biaya dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Pada unsur tarif/biaya 95% responden memberikan jawaban gratis, 2.5% memberikan jawaban murah dan sisanya memberikan jawaban cukup mahal dengan alasan biaya untuk layanan PBG cukup mahal.

Tabel 3. 2 Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	UNSUR	NRR	NILAI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
U1	Persyaratan	3,30	82,50	B	Baik
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,28	81,88	B	Baik
U3	Waktu	3,53	88,13	B	Baik
U4	Tarif/Biaya	3,93	98,13	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,43	85,63	B	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,33	83,13	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,40	85,00	B	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,23	80,63	B	Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,88	96,88	A	Sangat Baik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		**3,48**	**86,88**	**B**	**Baik**

Sumber: Data survei diolah, 2024

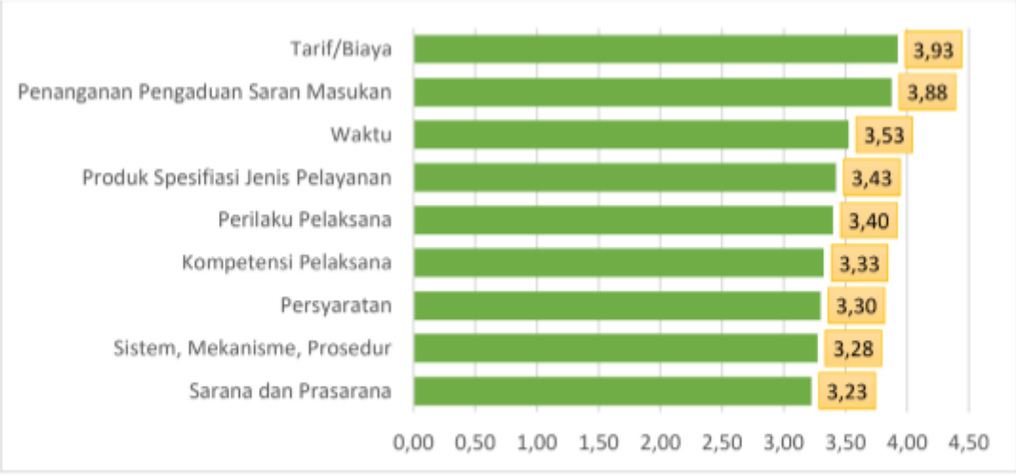

Gambar 3. 1 Grafik Nilai IKM Per Unsur

Untuk Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pelayan sesuai dengan harapan pengguna layanan. Terdapat 1 unsur yang memiliki terendah nilai terendah adalah pemenuhan sarana dan prasarana gedung. Pada dinas pekerjaan umum ada beberapa sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan penilaian antara lain; ruang khusus pengaduan, ruang pelayanan difabel, ruang tunggu VIP dan ramp untuk difabel.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 5. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Permasalahan	Hambatan
1	Masih rendahnya kompetensi dan kualitas penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum	Kurangnya kesadaran bagi penyedia dalam melaksanakan pembangunan atas pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan

Dampak Permasalahan dan hambatan dalam pencapaian :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

   Visi Kepala Daerah

   "Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia".

   Misi Kepala Daerah :

   1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global;
   2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkualitas;
   3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan;
   4. Meningkatkan Harmoni Sosial, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
   5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi public;
   6. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan;
   7. Meningkatkan kedtahanan social dan budaya masyarakat yang berkualitas.

   Misi Perangkat Daerah :

   "Meningkatkan dan Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan"

2. Terhadap Capaian Program Nasional (SPM, SDGs)

   Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat daerah :

Tabel 6. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Tantangan	Peluang
1	Pemberian soialisasi terhadap masyarakat Kota Madiun tentang penertiban pemanfaatan ruang	Adanya kesadaran dan partisipasi bagi masyarakat Kota Madiun untuk mendukung program pemerintah

Isu Penting serta rekomendasi dan catatan yang strategis dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas :

1. Isu Penting
   a. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana penataan ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif ;
   b. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
   c. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari aturan yang seharusnya ditegakkan sebagai akibat dari lemahnya dalam pengendalian bangunan;
   d. Belum optimalnya penyediaan jaringan drainase/ saluran untuk mengatasi masalah genangan/banjir di kawasan rawan genangan/ banjir di Kota Madiun;
   e. Belum optimalnya kondisi jalan dan jembatan perkotaan yang memberikan kenyamanan masyarakat;
   f. Belum optimalnya kondisi bangunan gedung pemerintah Kota Madiun.

2. Rekomendasi Catatan
   a. Perlu dilakukan peningkatan/ pemeliharaan kondisi bangunan/ gedung agar lebih representative dan untuk menambah masa manfaat;
   b. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pelayanan perangkat daerah;
   c. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan fungsi jaringan drainase/ saluran dikawasan perkotaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkenaan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebutuhan didasarkan pada evaluasi kinerja Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan identifikasi isu – isu penting yang telah dibagankan dalam bentuk Pohon Kinerja Perangkat Daerah.

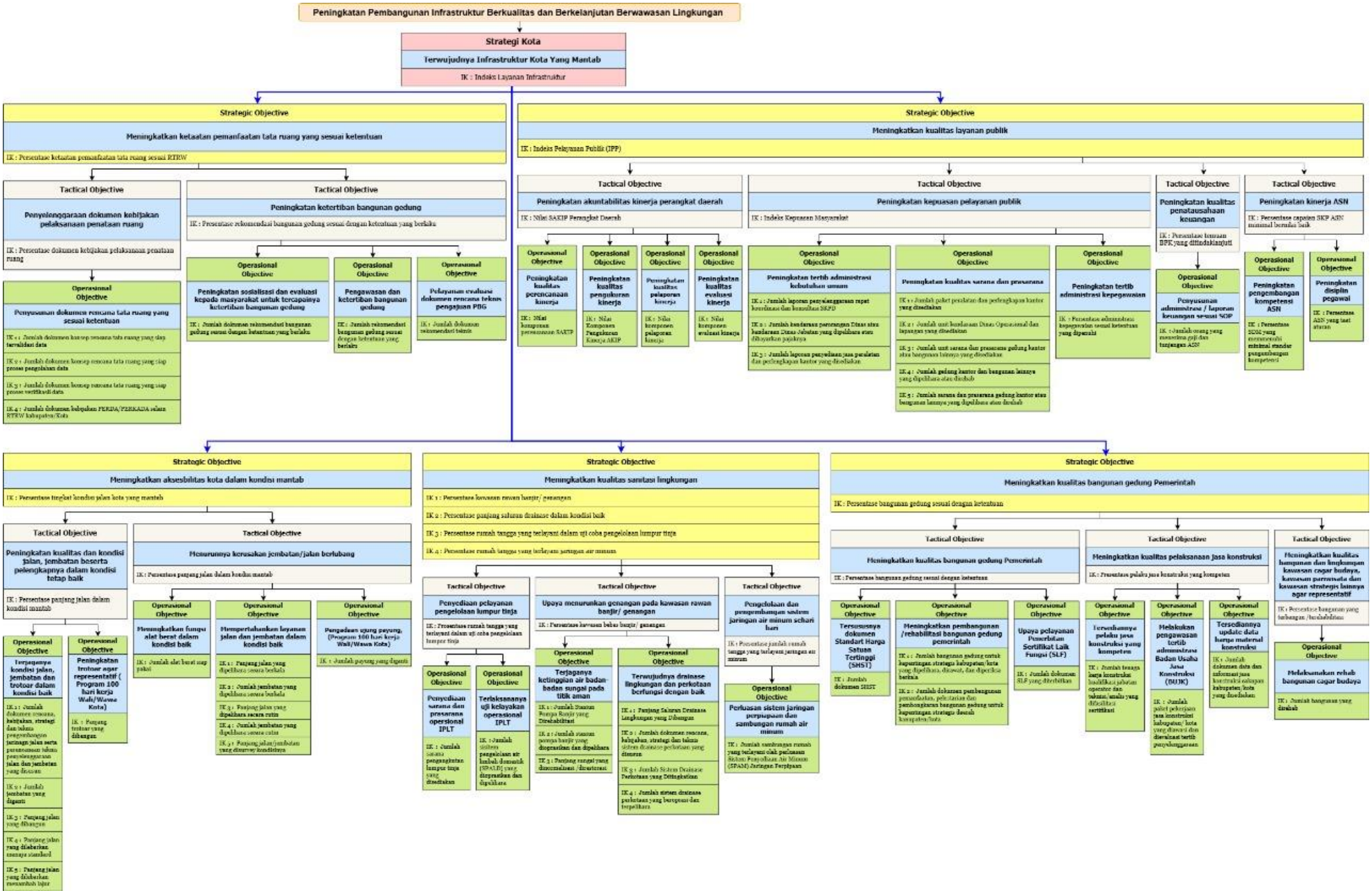

Gambar 1 Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tabel 7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Madiun**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah**	**Score A**	**13,128,150,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Madiun**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah**	**Score A**	**14,434,000,000**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**294.251.670**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**110,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	140.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	140.868.950	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah laporan capaian klinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja	12 laporan	120.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah laporan capaian klinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja	12 laporan	153.382.720	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan**	**100%**	**4.646.599.190**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan**	**100%**	**4.646.599.190**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 orang	4.646.599.190	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	4.646.599.190	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum**	**100%**	**467.467.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum**	**100%**	**467.467.000**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	467.467.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	467.467.000	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.362.140.368**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**775,000,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	1.198.340.368	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	1.198.340.368	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**7.289.459.777**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**7.289.459.777**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Laporan	7.289.459.777	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Laporan	7.289.459.777	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.164.701.636**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**919,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64 Unit	1.009.193.670	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64 Unit	1.009.193.670	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	923.319.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	923.319.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	230.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	232.188.966	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**16.97%**	**7.418590.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**16.97%**	**14,151,000,000**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**16.97%**	**7.418590.000**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**16.97%**		
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	438.110.000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	886.260.000	
	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	0	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 km	6.094.220.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 km	6.094.220.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	886.260.000	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	886.260.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**123,019,490**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**125,000,000**	
	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**123,019,490**	**Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**125,000,000**	
	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	0	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	0	
	Perluasan system penyediaan air minum jaringan perpipaan	Kota Madiun	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan system penyediaan air minum jaringan perpipaan	100 SR	645.649.300	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan system penyediaan air minum jaringan perpipaan	Kota Madiun	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan system penyediaan air minum jaringan perpipaan	1 Dokumen	645.649.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Kota Madiun**	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Dalam Uji Coba Pengelolaan Lumpur Tinja	100%	**1.670.125.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Kota Madiun**	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Dalam Uji Coba Pengelolaan Lumpur Tinja	100%	**1.670.125.500**	
	Penyediaan sarana pengangkuta lumpur tinja	**Kota Madiun**	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan	1 unit	1.342.300.000	Penyediaan sarana pengangkuta lumpur tinja	**Kota Madiun**	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan	1 unit	1.342.300.000	
	Operasi dan pemeliharaan system pemeliharaan air limbag domestik	**Kota Madiun**	Jumlah system air limbah domestic yang dioprasikan dan dipelihara	5 unit	327.825.500	Operasi dan pemeliharaan system pemeliharaan air limbag domestik	**Kota Madiun**	Jumlah system air limbah domestic yang dioprasikan dan dipelihara	5 unit	327.825.500	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,67%**	**18.363.700.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,67%**		
	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,67%**	**18.363.700.000**	**Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,12%**	**3,950,000,000**	
	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	12 dokumen	949.910.000	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	12 dokumen	949.910.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase lingkungan yang Dibangun	2000 m	7.632.870.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2000 m	7.632.870.000	
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 sistem drainase perkotaan	7.080.920.000	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 sistem drainase perkotaan	7.080.920.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Jumlah sistem Drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	1 sistem drainase perkotaan	2.700.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Madiun	Jumlah sistem Drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	1 sistem drainase perkotaan	2.792.890.200	
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**	**23.750.000.000**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**	**23.750.000.000**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**		
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan	Kota Madiun	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang	10 Dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran	Kota Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG),	10 Dokumen	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Dipelihara, Dirawat dan Diperiksa Berkala			Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			
34	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	19,813,058,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	21,000,000,000	
35	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**21,846,810,878**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**22,600,000,000**	
36	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**21,846,810,878**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**22,600,000,000**	
37	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	21,253,876,878	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	22,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	592,934,000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	600,000,000	
39	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**69,379,016,832**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**73,520,000,000**	
40	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**69,379,016,832**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**73,520,000,000**	
41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	20 Dokumen	270,566,832	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	20 Dokumen	280,000,000	
42	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	12,834,700,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	15,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	408,600,000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	410,000,000	
44	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	654,850,000	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	700,000,000	
45	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km	`	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km	-	
46	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	872,000,000	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	900,000,000	
47	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	18,511,100,000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	20,000,000,000	
48	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	3,815,700,000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	4,000,000,000	
49	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	31,784,750,000	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	32,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	226,750,000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	230,000,000	
51	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**453,469,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**460,000,000**	
52	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**207,669,000**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**210,000,000**	
53	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	207,669,000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	210,000,000	
54	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Kota Madiun**	**Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi**	**94.95%**	**245,800,000**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Kota Madiun**	**Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi**	**94.95%**	**250,000,000**	
55	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	245,800,000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**2,150,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**2,450,000,000**	
57	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**1,350,000,000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**1,550,000,000**	
58	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
59	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,100,000,000	
60	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	
61	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	200,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**400,000,000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**450,000,000**	
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	450,000,000	
64	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**400,000,000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**450,000,000**	
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	450,000,000	

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Tabel 8. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	Usulan Sumber Pendanaan (APBD Prov / BK Prov/ APBN / DAK / DBHCHT / Lainnya (sebutkan)	Penjelasan dikaitkan dengan isu penyelanggaraan sesuai Tupoksi / Isu Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)/Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wialayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi/Pekerjaan Sungai Normalisasi Saluran Kali Gempol Tahap 2	Panjang saluran yang tertutup	Kelurahan Madiun Lor	200 meter	4.7 M	APBD	Upaya pemerintah dalam rangka mengintegrasikan program pengentasan permukiman kumuh (Program PPKT)
2.	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota /Pekerjaan Rehabilitasi Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah Gedung yang direhab	Kelurahan Pandean	1 Gedung	2.2 M	APBD	Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan layanan yang lebih efisien, efektif, dan transparan.

3.	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan/ Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Tematik	Luas lahan yang tersedia dalam penyelenggaraan jalan	Kelurahan Nambangan Lor	225 SR	420 juta	DAK	meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang bersih dan aman, sehingga masyarakat dapat memiliki jaringan air bersih dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Catatan : tabel untuk usulan APBD Provinsi maupun APBN

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun No. 73 Tahum 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi :

"**Prioritas Nasional 5, yaitu Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar".**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2025- 2029 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tiggi untuk mencapai sasaran priortas pembangunan. Dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 9. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	92.63%

Tabel 10. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	85.50%
2	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	100%
3	Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	95.90%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan	95.90%
4	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81.67%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	82.01%
		Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	16.97%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan kawasan Permukiman rawan Banjir	1.13%
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum dalam jaringan perpipaan	72%
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	20%
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan gedung dalam kondisi baik	100%
				PROGRAM PENATAAN	Persentase Penataan	100%

				BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan Lingkungan	
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	100%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel 8 dan tabel 9 dapat dilihat bahwa tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun yaitu "Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas" dengan indikator kinerja pada tahun 2026 yaitu Indeks kepuasan layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 92.63 %. Kualitas infrastruktur kota adalah kualitas jalan yang mantab, bangunan gedung pemerintah yang representatif, saluran lingkungan dan saluran drainase berfungsi dengan baik. Sedangkan kinerja yang dibentuk dari rata-rata beberapa indicator antara lain; indakator presentase jalan dalam kondisi mantab, presentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (limbah domestic dan sampah).

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Kota Madiun memiliki 5 sasaran antara lain; Meningkatnya kualitas layanan public, Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan, Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab, Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan, Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah. Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Meningkatnya aksesbilitas kota yang merata dengan indikator persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab dengan target 95.90%, meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan dengan 3 indikator pendukung antara lain; Presentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum dengan target 100%, presentase kawasan rawan banjir/genangan dengan target 16.74%, meningkatnya kualitas pembangunan gedung Pemerintah dengan target 100%, meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dengan target 100%.

3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ada di daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya :

Tabel 11. Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					
1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
	1. Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	√				
	2. Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	√				
	3. Normalisasi/ Restorasi Sungai	√				
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					
2.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/ Kota**					
	4. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	√		√	√	√
C.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					
3.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	5. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	√		√		√
	6. Penyediaan Sarana Pengankutan Lumpur Tinja	√		√		√
D.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	7. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	√	√			√
	8. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	√	√			√
	9. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	√	√			√
	10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	√	√			√
E.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					
5.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**					
	11. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	√	√			
	12. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	√	√			
	13. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	√	√			
F.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**					
	14. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	√	√			
G.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					
7.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**					
	15. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	√	√			
	16. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	√	√			
	17. Pelebaran Jalan Menambah Lajur					
	18. Pemeliharaan Rutin Jalan	√	√			
	19. Pembangunan Jalan					
	20. Pemeliharaan Berkala Jalan	√	√			
	21. Pemeliharaan Rutin Jembatan	√	√			
	22. Pelebaran Jalan Menuju Standar	√	√			
	23. Pembangunan Jembatan	√	√			
H.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					
8.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**					
	24. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	√				
9.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**					

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	25. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	√				
10.	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**					
	26. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	√				
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					
11.	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**					
	27. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	√				
12.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**					
	28. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	√				
13.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**					
	29. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	√				
J.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
14.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	30. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√				
	31. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√				
15.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	32. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√				
16.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√				
17.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	34. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√				
	35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				
18.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	36. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√				
19.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				
	38. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				
	39. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				

Catatan : di bawah tabel berikan narasi penjelasan faktor lain

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, maka pada Tahun 2026 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah :

1. Jumlah Usulan :
   a. Program : 10 Program
   b. Kegiatan : 19 Kegiatan
   c. Sub Kegiatan : 39 Sub Kegiatan
   d. Pagu Anggaran : Rp. 104.340.658.809,-
   e. Sumber Pendanaan :
      i. APBD : Rp. 104.340.658.809,-
      ii. APBD PROV : Rp. -
      iii. APBN : Rp. -
      iv. Lainnya : Rp. -
   f. Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

Tabel 12. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Serta Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kota Madiun**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah**	**Score A**	**13,128,150,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Madiun**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah**	**Score A**	**14,434,000,000**	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**100,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**110,000,000**	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	110,000,000	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan**	**100%**	**7,000,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan**	**100%**	**7,700,000,000**	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	7,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	7,700,000,000	
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum**	**100%**	**300,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum**	**100%**	**330,000,000**	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	330,000,000	
8	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**664,550,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**775,000,000**	
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	552,050,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Madiun	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	650.000.000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	112,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	125.000.000	
11	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4,210,800,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4,600,000,000**	
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Laporan	4,210,800,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Laporan	4.600.000.000	
13	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**852,800,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Madiun**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**919,000,000**	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	380,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	400,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	471,900,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	519,000,000	
16	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**17.34%**	**13,464,112,400**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**17.34%**	**14,151,000,000**	
17	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**17.34%**	**13,464,112,400**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan**	**17.34%**	**14,151,000,000**	
18	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Madiun	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	0	
19	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	235,100,000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	250,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	3,125,800,000	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	1 Unit	3,500,000,000	
21	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 km	9,022,332,400	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Madiun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 km	9,200,000,000	
22	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,080,880,000	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Madiun	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,200,000,000	
23	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**123,019,490**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**125,000,000**	
24	**Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**123,019,490**	**Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**100%**	**125,000,000**	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	123,019,490	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Kota Madiun	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	125,000,000	
26	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,12%**	**3,399,879,400**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,12%**	**3,950,000,000**	
27	**Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,12%**	**3,399,879,400**	**Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**80,12%**	**3,950,000,000**	
28	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	8 dokumen	934,750,000	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan	Kota Madiun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	8 dokumen	1,200,000,000	
29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 m	16,210,400,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 m	16,250,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 m	2,254,729,400	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Madiun	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 m	2,500,000,000	
31	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**	**20,055,958,000**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**	**21,260,000,000**	
32	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**	**20,055,958,000**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Kota Madiun**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**100%**	**21,260,000,000**	
33	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,	Kota Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung,	50 Dokumen	242,900,000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	50 Dokumen	260,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	serta Implementasi SIMBG		serta Implementasi SIMBG								
34	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	19,813,058,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	21,000,000,000	
35	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**21,846,810,878**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**22,600,000,000**	
36	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**21,846,810,878**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase panjang saluran dalam kondisi baik**	**80.12%**	**22,600,000,000**	
37	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	21,253,876,878	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	22,000,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	592,934,000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Madiun	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	600,000,000	
39	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**69,379,016,832**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**73,520,000,000**	
40	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**69,379,016,832**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**96%**	**73,520,000,000**	
41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	20 Dokumen	270,566,832	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	20 Dokumen	280,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	12,834,700,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Madiun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	15,000,000,000	
43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	408,600,000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Madiun	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan	2 Dokumen	410,000,000	
44	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	654,850,000	Pembangunan Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang dibangun	2 km	700,000,000	
45	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km	0	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standart	2 km	0	
46	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	872,000,000	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 km	900,000,000	
47	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	18,511,100,000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 km	20,000,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
48	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	3,815,700,000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Madiun	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17 km	4,000,000,000	
49	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	31,784,750,000	Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 m	32,000,000,000	
50	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	226,750,000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Madiun	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 m	230,000,000	
51	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**453,469,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**460,000,000**	
52	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**207,669,000**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Kota Madiun**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat**	**94.95%**	**210,000,000**	
53	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	207,669,000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	210,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
54	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Kota Madiun**	**Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi**	**94.95%**	**245,800,000**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Kota Madiun**	**Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi**	**94.95%**	**250,000,000**	
55	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	245,800,000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kota Madiun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50 Orang	250,000,000	
56	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**2,150,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**2,450,000,000**	
57	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**1,350,000,000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Prosentase Ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**1,550,000,000**	
58	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
59	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,100,000,000	
60	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	
61	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	200,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	250,000,000	
62	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**400,000,000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**450,000,000**	
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	450,000,000	

No	Tahun Anggaran 2025					Tahun Anggaran 2026					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**400,000,000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Madiun**	**Presentase Ketaatan tethadap RTRW**	**100%**	**450,000,000**	
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	450,000,000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 yang harus didukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun mempunyai prioritas pembangunan dalam mendukung Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase dan saluran lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah Kota Madiun serta pelayanan pemberian rekomendasi bangunan. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki pagu anggaran Rp. 106.813.130.705. Seluruh anggaran berasal dari dana alokasi umum (DAU). Berikut ini besaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap program yang adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 16.060.819.641
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 7.418.590.000
3.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 645.649.300
4.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 18.456.590.200
5.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 24.300.070.164
6.	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Rp. 1.014.206.000
7.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 34.486.731.600
8.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.360.348.300
9.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.400.000.000

Tabel 13. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**Skor**	**85,50 Skor**	**Rp 104.340.658.809,49**			**85,55 Skor**	**Rp 109.533.184.867,93**	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**Skor**	**85,50 Skor**	**Rp 104.340.658.809,49**			**85,55 Skor**	**Rp 109.533.184.867,93**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85,63 Skor**	**85,63 Skor**	**Skor**	**85,50 Skor**	**Rp 17.389.600.952,49**			**85,55 Skor**	**Rp 15.936.000.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 379.589.960,00**			**100%**	**Rp 405.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	Rp 54.042.250,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	8 Dokumen	Rp 55.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	Rp 325.547.710,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	Rp 350.000.000,00	DPUPR

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	**03**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Keuangan**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 4.962.754.767,15**			**100%**	**Rp 4.000.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	Rp 4.962.754.767,15	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	55 Orang/Bulan	Rp 4.000.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Umum**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 583.503.000,00**			**100%**	**Rp 500.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	Rp 583.503.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	Rp 500.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 522.472.555,00**			**100%**	**Rp 540.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	-	-	Unit	5 Unit	Rp 387.192.550,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Unit	Rp 400.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Unit	2 Unit	Rp 135.280.005,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Unit	Rp 140.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 9.093.423.606,84**			**100%**	**Rp 8.000.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Yang Diseiakan	-	-	Laporan	12 Laporan	Rp 9.093.423.606,84	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	Rp 8.000.000.000,00	DPUPR

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	**03**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 1.847.857.063,50**			**100%**	**Rp 2.491.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	54 Unit	54 Unit	Unit	64 Unit	Rp 1.084.814.450,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	64 Unit	Rp 1.300.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	Rp 477.070.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	Rp 491.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	Unit	5 Unit	Rp 285.972.613,50	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Unit	Rp 300.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir**	**17,17%**	**17,17%**	**%**	**16,74%**	**Rp 7.511.689.900,00**			**16,50%**	**Rp 9.730.000.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Bebas Banjir/ Genangan**	**82,83%**	**82,83%**	**%**	**83,26%**	**Rp 7.511.689.900,00**				**Rp 9.730.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	02	2,01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir Yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	Rp 438.108.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp 530.000.000,00	DPUPR
1	03	02	2,01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir Yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	Rp 236.566.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	Rp 300.000.000,00	DPUPR

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	03	02	2,01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang Dinormalisasi/Direstorasi	1,55 Km	1,55 Km	Km	1,55 Km	Rp 6.837.015.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,55 Km	Rp 8.900.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 677.088.000,00**			**100%**	**Rp 700.000.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Belum Terlayani Kebutuhan Jaringan Air Minum**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 677.088.000,00**			**100%**	**Rp 700.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	03	2,01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	273 SR	273 SR	SR	100 SR	Rp 677.088.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	100 SR	Rp 700.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)**	**-**	**-**	**%**	**100%**	**Rp 1.134.194.000,00**			**100%**	**Rp 420.000.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**05**	**2,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Pelayanan Domestik**	**-**	**-**	**%**	**100%**	**Rp 1.134.194.000,00**			**100%**	**Rp 420.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	05	2,01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Yang Dioptimalisasi	-	-	Unit	5 Unit	Rp 329.315.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	8 Unit	Rp 400.000.000,00	DPUPR

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	03	05	2,01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Yang Disediakan	-	-	Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	Rp 804.878.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	20 Rumah Tangga	Rp 20.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik**	**81,03%**	**81,03%**	**%**	**82,01%**	**Rp 18.132.540.000,00**			**82,26%**	**Rp 20.070.000.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**06**	**2,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Saluran Drainase Lingkungan Yang Dibangun**	**81,03%**	**81,03%**	**%**	**82,01%**	**Rp 18.132.540.000,00**			**82,26%**	**Rp 20.070.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	06	2,01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan Yang Dibangun	-	-	Meter	2000 Meter	Rp 7.680.236.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2000 Meter	Rp 7.750.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2,01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Dibangun	18 Sistem Drainase Perkotaan	18 Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	Rp 7.830.080.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Sistem Drainase Perkotaan	Rp 8.500.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2,01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	Rp 950.787.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Dokumen	Rp 1.000.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2,01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Beroperasi dan Tepelihara	12 Sistem Drainase Perkotaan	12 Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	Rp 1.671.437.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Sistem Drainase Perkotaan	Rp 2.800.000.000,00	DPUPR
					Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Ditingkatkan	-	-	Sistem Drainase Perkotaan	-	Rp -	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Sistem Drainase Perkotaan	Rp 20.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 21.803.252.600,00**			**100%**	**Rp 24.870.000.000,00**	**DPUPR**

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	**03**	**08**	**2,01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Bangunan Gedung Sesuai Dengan Ketentuan**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 21.803.252.600,00**			**100%**	**Rp 24.870.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	08	2,01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BangunanGedung Untuk Kepentingan Stratgis Kabupaten/Kota Yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	11 Bangunan Gedung	11 Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung	Rp 607.834.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	8 Bangunan Gedung	Rp 620.000.000,00	DPUPR
1	03	08	2,01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	Rp 20.945.422.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	Rp 24.000.000.000,00	DPUPR
1	03	08	2,01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	36 Dokumen	36 Dokumen	Dokumen	10 Dokumen	Rp 249.995.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	10 Dokumen	Rp 250.000.000,00	DPUPR

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**81,03%**	**81,03%**	**%**	**100%**	**Rp 3.085.893.500,00**			**100%**	**Rp 3.500.000.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**09**	**2,01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Bangunan/ Gedung Yang Terbangun/ Terehabilitasi**	**81,03%**	**81,03%**	**%**	**100%**	**Rp 3.085.893.500,00**			**100%**	**Rp 3.500.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	09	2,01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan Penatan Bangunan dan Lingkungan			Kawasan	1 Kawasan	Rp 3.085.893.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Kawasan	Rp 3.500.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Tingkat Kemantapan Jalan**	**96,01%**	**96,01%**	**%**	**95,90%**	**Rp 32.126.038.400,00**			**95,98%**	**Rp 31.777.879.867,93**	**DPUPR**
1	**03**	**10**	**2,01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantab**	**96,01%**	**96,01%**	**%**	**95,90%**	**Rp 32.126.038.400,00**			**95,98%**	**Rp 31.777.879.867,93**	**DPUPR**
1	03	10	2,01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	Rp 222.289.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Dokumen	Rp 244.518.340,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Diganti	-	-	Jembatan	-	Rp -	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Jembatan	Rp 100.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dipelihara Secara Berkala	-	-	Jembatan	2 Jembatan	Rp -	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Jembatan	Rp 400.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan Yang Disurvey Kondisinya	433,485 Km	433,485 Km	Km	433,485 Km	Rp 408.806.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	433,485 Km	Rp 450.000.000,00	DPUPR

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	03	10	2,01	0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menambah Lajur	2 Km	2 Km	Km	1 Km	Rp 3.610.884.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Km	Rp 3.800.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Rutin	17 Km	17 Km	Km	39 Km	Rp 4.049.607.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	37 Km	Rp 4.500.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun Sampai Perkerasan	2 Km	2 Km	Km	0,5 Km	Rp 2.228.709.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,5 Km	Rp 2.000.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	20,37 Km	20,37 Km	Km	8 Km	Rp 15.670.719.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	8 Km	Rp 13.469.780.000,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dipelihara Secara Rutin	15 Jembatan	15 Jembatan	Jembatan	15 Jembatan	Rp 238.456.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	15 Jembatan	Rp 503.581.527,93	DPUPR
1	03	10	2,01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menuju Standar	-	-	Km	1 Km	Rp 710.558.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Km	Rp 801.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2,01	0069	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dibangun	2 Jembatan	2 Jembatan	Meter	10 Meter	Rp 4.986.007.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	10 Meter	Rp 5.500.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 919.769.400,00**			**100%**	**Rp 936.305.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**11**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 218.274.800,00**			**100%**	**Rp 220.650.000,00**	**DPUPR**
1	03	11	2,01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Yang Difasilitasi Sertifikasi	-	-	Orang	60 Orang	Rp 218.274.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	60 Orang	Rp 220.650.000,00	DPUPR

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	**03**	**11**	**2,02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**-**	**-**	**%**	**100%**	**Rp 52.601.000,00**			**100%**	**Rp 53.655.000,00**	**DPUPR**
1	03	11	2,02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Yang Disediakan	-	-	Dokumen	2 Dokumen	Rp 52.601.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	Rp 53.655.000,00	DPUPR
1	**03**	**11**	**2,04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase Badan Usaha Konstruksi Yang Diawasi**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 648.893.600,00**			**100%**	**Rp 662.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	11	2,04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstrusi Kabupaten/Kota Yang Diawasi dan Dievaluasi Terib Penyelenggaraan	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	Rp 648.893.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	100 Paket Pekerjaan	Rp 662.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 1.560.592.057,00**			**100%**	**Rp 1.593.000.000,00**	**DPUPR**
1	**03**	**12**	**2,01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai RTRW**	**100%**	**100%**	**%**	**100%**	**Rp 649.999.760,00**			**100%**	**Rp 663.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	12	2,01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Rp 649.999.760,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	Rp 663.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**12**	**2,03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Surat Teguran Yang Ditindaklanjuti**	1	1	**%**	**100%**	**Rp 519.999.702,00**			**100%**	**Rp 530.000.000,00**	**DPUPR**

KODE					URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	03	12	2,03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	20 Dokumen	Rp 519.999.702,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	20 Dokumen	Rp 530.000.000,00	DPUPR
1	**03**	**12**	**2,04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang**	1	1	**%**	**100%**	**Rp 390.592.595,00**			**100%**	**Rp 400.000.000,00**	**DPUPR**
1	03	12	2,04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	120 Dokumen	120 Dokumen	Dokumen	120 Dokumen	Rp 390.592.595,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	120 Dokumen	Rp 400.000.000,00	DPUPR

Catatan : Format SIPD

Madiun, September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN

THARIQ MEGAH, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197710122006041009

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui musyawarah pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis maka tujuan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas layanan perhubungan darat dengan sasaran meningkatnya kelancaran lalu lintas.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025.

Madiun, 9 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN

THARIQ MEGAH, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197710122006041009